

ABSTRAK

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, wilayah Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini, pengaturan mengenai pekerjaan umum di Kabupaten Kulon Progo diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Pelaksaaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah pelaksanaan fungsi Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jalan.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum *juridis normatif*. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian *deskriptif analitis*. Sedangkan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya, dalam menganalisa penelitian ini metode yang digunakan adalah *analisis kualitatif*.

Hasil penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan fungsi Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman meliputi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan serta pemeliharaan jalan. Penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan meliputi pembangunan jalan kabupaten dan peningkatan jalan kabupaten. Sedangkan penyelenggaraan pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan berkala jalan kabupaten dan pemeliharaan rutin jalan kabupaten. Dalam pelaksanaan fungsi Bina Marga tersebut, terdapat hambatan-hambatan meliputi volume pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah pegawai, jumlah pabrik aspal yang hanya sedikit, anggaran yang menurun, dan pembebasan tanah yang sulit. Dalam menanggulangi hambatan tersebut, Bina Marga melaksanakan upaya meliputi memaksimalkan potensi pegawai, mempekerjakan pegawai kontrak, penyesuaian program pekerjaan dengan jadwal antrian aspal, melaksanakan program yang lebih mendesak dan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo dalam rangka penyelesaian tugas mengenai volume yang banyak dan pegawai yang sedikit, perlu diadakan pelatihan untuk pegawai kontrak sehingga pegawai kontrak juga bisa terlibat lebih banyak dalam penyelesaian tugas, dan perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang program pemerintah terkait pembangunan.

Kata Kunci : Penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jalan, Kabupaten Kulon Progo